

## **ALASAN PBB MEMPERPANJANG MISI UNAMA DI AFGHANISTAN**

**Leniana Devi Rahmawati Putri**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: [151200068@gmail.com](mailto:151200068@gmail.com)

**Salma Fauziah Khairunnisa**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: [salmaf.khairunnisa@gmail.com](mailto:salmaf.khairunnisa@gmail.com)

### **Abstrak**

Dengan penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan dan kembali berkuasanya Taliban, ternyata tidak membuat UNAMA turut serta menarik diri walaupun banyak mendapat tekanan dari dunia internasional. Untuk itulah penelitian ini akan menjawab alasan mengapa PBB masih memperpanjang misi UNAMA di Afghanistan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, website, maupun sumber lainnya yang relevan. Untuk menganalisis masalah, penelitian ini menggunakan analisis teori organisasi internasional dikhususkan pada fungsi sebagai sistem internasional yang berperan dalam menyelesaikan konflik internasional. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan perpanjangan mandat UNAMA. Faktor-faktor tersebut meliputi promosi perdamaian, perwujudan stabilitas keamanan, persamaan hak asasi manusia terutama perempuan, menjamin kondisi sosial ekonomi setelah terjadi peralihan kekuasaan ke Taliban untuk tidak semakin memprihatinkan, membantu Afghanistan dalam pembangunan negaranya, serta mencegah Taliban untuk tidak kembali seperti dahulu dan mengasingkan diri dari dunia internasional.

**Kata Kunci:** Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNAMA, Afghanistan, Taliban.

### **Abstract**

With the withdrawal of the United States from Afghanistan and the return to power of the Taliban, UNAMA apparently did not participate in withdrawing even though it was under a lot of pressure from the international community. For this reason, this research will answer the reasons why the UN is still extending the UNAMA mission in Afghanistan. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method by collecting data from books, journals, websites, and other relevant sources. To analyze the problem, this study uses an analysis of international organization theory devoted to its function as an international system that plays a role in resolving international conflicts. Based on the research that has been done, the authors see that there are several factors which are the

reasons for the extension of UNAMA's mandate. These factors include promoting peace, realizing security stability, equal human rights, especially women, guaranteeing socio-economic conditions after the transfer of power to the Taliban is not a cause for concern, helping Afghanistan in developing its country, and preventing the Taliban from returning to how it was before and alienating them. themselves from the world.

**Keyword:** United Nations, UNAMA, Afghanistan, Taliban

## **PENDAHULUAN**

UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) merupakan badan PBB yang mengemban sebuah misi politik di Afghanistan. Badan ini berdiri berdasarkan Resolusi 1401 Dewan Keamanan PBB pada Maret 2002. Secara garis besar, UNAMA memiliki misi untuk membantu pemerintah Afghanistan menciptakan perdamaian dan situasi yang kondusif di negara Asia Selatan tersebut. Kehidupan politik di Afghanistan sendiri sudah diwarnai konflik berupa perang sipil dan ketidakstabilan selama lebih dari tiga dekade. Selama kurun waktu tersebut, Taliban menjadi kelompok yang mendominasi kekuasaan di negara Asia Tengah tersebut. Mereka mengontrol sekitar 90% wilayah negara, termasuk ibukota Kabul dan kota-kota penting lainnya.

Salah satu era kependudukan Taliban di Afghanistan yang memberi pengaruh signifikan terjadi di rentang tahun 1996-2001. Kala itu, Taliban menegakkan pemerintahan yang sangat otoriter berbasis hukum *syariah*. Berdasarkan hukum tersebut, ada banyak larangan yang berlaku, seperti larangan mendengarkan musik hingga larangan bekerja dan bersekolah, khususnya bagi para perempuan. Ketat dan otoriternya pemerintahan Taliban menimbulkan penderitaan bagi banyak warga Afghanistan serta memperburuk tingkat perekonomian (Modebadze, 2022: 280). Gambaran singkat tentang perekonomian Afghanistan yang dirilis bank dunia pada Oktober 2001 menyatakan bahwa perekonomian negara tersebut berada pada kondisi kolaps karena kekeringan, kelaparan, pelarangan perdagangan opium, dan perpindahan penduduk besar-besaran.

Kekuasaan Taliban tersebut berakhir ketika koalisi tentara yang dipimpin Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada tahun 2001, tepatnya setelah adanya teror di gedung *World Trade Center*, New York. Selain bertujuan untuk menangkap otak di balik kejadian teror—Osama bin Laden—yang dipercaya berada di Afghanistan, Amerika

Serikat juga berkomitmen untuk mencegah Afghanistan menjadi sarang teroris. Dalam waktu 20 tahun kemudian, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari Afghanistan secara total. Penarikan terakhir dari pasukan militer Amerika Serikat terjadi pada Agustus 2021.

Penarikan pasukan militer Amerika Serikat tersebut membuat Taliban berani menggulingkan pemerintahan demokratis Afghanistan dengan menguasai kota-kota besar, termasuk ibu kota Kabul (Modebadze, 2022: 278). Kekuatan dan kecepatan Taliban dalam menyapu wilayah-wilayah strategis hingga pedesaan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang menangis dan memohon kepada pihak maskapai penerbangan agar keluarganya dapat ikut terbang meninggalkan Afghanistan dengan penerbangan komersial terakhir (Zucchini, 2021). Sementara itu, jalan-jalan raya di Kota Kabul dipenuhi dengan kendaraan warga sipil. Mereka turut ingin meninggalkan kota yang sudah diinvasi oleh Taliban tersebut. Kerasnya pemerintahan Taliban pada rezim sebelumnya (1996–2001) masih membekas dalam benak warga Afghanistan, sehingga kembalinya tampuk kekuasaan Taliban membawa banyak kekhawatiran bagi para masyarakat sipil.

Lebih lanjut, ketidakberdayaan tentara Afghanistan dalam menghadapi serangan Taliban membuat dunia internasional terkejut (Modebadze, 2022: 278). Sebab, persenjataan yang dimiliki tentara Afghanistan dinilai lebih canggih daripada milik Taliban. Namun, Taliban dengan mudahnya menggulingkan pemerintahan demokratis Afghanistan dan memecah belah stabilitas pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Maka, dalam waktu sekejap, Taliban dinyatakan telah mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Segera setelah menguasai Afghanistan, Taliban mengadakan konferensi pers dengan mendapuk tokohnya, Zahirullah Majid, sebagai juru bicara. Melalui konferensi tersebut, Taliban menyatakan akan menerapkan pemerintahan yang moderat kali ini, sehingga perempuan pun tetap bisa aktif dalam lingkungan masyarakat, di bawah naungan kerangka ajaran Islam. Namun, janji tersebut dengan segera tidak terpenuhi kala Taliban memberlakukan berbagai aturan ketat yang membatasi keleluasaan perempuan. Salah satunya, aturan menutup tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bila melanggar, suami atau keluarga laki-lakinya akan dijatuhi

hukuman. Tak hanya perempuan, sektor yang lain juga turut dibatasi, yakni pers hingga ekonomi (Cavanagh et al., 2022).

Dengan kondisi domestik Afghanistan yang terus berkejolak, hal tersebut tentu memberikan kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut mulai dari rusaknya infrastruktur hingga lumpuhnya seluruh bidang kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Ekonomi negara tersebut langsung merosot sebesar 20-30% sejak Agustus 2021. Penyebabnya cukup rumit dan bervariasi: banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, layanan-layanan sosial ditutup, kelaparan dan kemiskinan makin merajalela, para masyarakat melakukan eksodus, hingga tutupnya bisnis-bisnis masyarakat sipil karena tingkat investasi yang rendah (Byrd, 2022). Akhirnya, konflik tak berkesudahan ini telah menarik dunia internasional, hingga PBB membentuk United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) untuk membantu menyelesaikan konflik di Afghanistan.

UNAMA yang dibentuk pada tahun 2002 melalui resolusi PBB 1401 merupakan bentuk bantuan kemanusiaan sekaligus misi politik dari PBB. UNAMA dibentuk setelah pernyataan negara tersebut untuk bekerja sama dengan PBB. Sejak dibentuknya UNAMA, badan ini telah melakukan berbagai bentuk bantuan, terutama dalam misi kemanusiaan. Badan ini juga bertugas untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. UNAMA juga berperan penting dalam membangun integritas Afghanistan kembali serta berperan penting dalam meminimalisir dampak yang diterima para warga sipil Afghanistan.

Misi UNAMA di Afghanistan mengalami perubahan setiap tahunnya tergantung pada kebutuhan negara tersebut dan diperpanjang setiap satu tahun. Mandat yang telah diresolusikan PBB mengenai misi UNAMA konsisten dengan resolusinya 1401 (2002), 1471 (2003), 1536 (2004), 1589 (2005), 1662 (2006), 1746 (2007), 1806 (2008), 1868 (2009), 1917 (2010), 1974 (2011), 2041 (2012), 2096 (2013), 2145 (2014), 2210 (2015), 2274 (2016), 2344 (2017), 2405 (2018), 2460 (2019), 2489 (2019), 2543 (2020), 2596 (2021), dan yang paling terbaru 2626 (2022).

Pada Maret 2022, Dewan Keamanan PBB memperbaharui mandat UNAMA untuk satu tahun lagi, yakni hingga 17 Maret 2023. Resolusi 2626 tersebut disetujui oleh 14

negara dari total 15 negara anggota. Melalui persetujuan tersebut, PBB memutuskan bahwa UNAMA dan perwakilan khusus dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB akan melanjutkan mandat untuk mendukung masyarakat Afghanistan. Tak hanya untuk UNAMA, Resolusi 2626 juga berlaku untuk semua aktor politik Afghanistan, pemangku kebijakan, dan aktor internasional yang relevan. Mereka diharapkan dapat bekerjasama dengan UNAMA dalam memastikan keamanan dan kebebasan PBB serta personilnya. Selain itu, resolusi terbaru ini meminta Sekjen untuk memberi laporan kepada Dewan Keamanan setiap tiga bulan sekali tentang situasi di Afghanistan. Adapun mandat terbaru ini juga dikhususkan untuk memberi perlindungan pada kelangsungan hak asasi manusia, khususnya hak para perempuan Afghanistan yang terancam oleh kebijakan Taliban yang represif. Maka dari itu, UNAMA juga menolak untuk mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah.

Amerika Serikat yang memiliki perjanjian dengan kelompok Taliban bahwa apabila Taliban telah memutus hubungannya dengan kelompok pemberontak, akhirnya di masa kepemimpinan Joe Biden memutuskan untuk menarik mundur pasukannya di Afghanistan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diidentifikasi adalah "Apa alasan PBB masih memperpanjang misi tugas UNAMA di Afghanistan?". Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat mengetahui alasan PBB masih memperpanjang misi UNAMA walaupun Amerika telah menarik diri dan mempercayai Taliban.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dalam hubungan internasional telah menunjukkan betapa pentingnya keberadaannya karena telah berhasil memecahkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi suatu negara. Keberadaan organisasi internasional mencerminkan bahwa kebutuhan manusia untuk bekerjasama merupakan hal yang penting. Kerjasama inilah yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik yang dihadapi dalam kehidupan suatu negara maupun dunia internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai institusi yang mengacu pada sistem,

aturan, dan tujuan formal serta berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan antara anggota—termasuk pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggota. Organisasi internasional dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu IGO (Intergovernmental Organization) dan INGO (International Non-Governmental Organization).

Dalam menjalankan tugasnya organisasi internasional tentu memiliki fungsi-fungsi atau *roles* tersendiri. Menurut Karen Mingst dalam bukunya yang berjudul *“Essentials of International Relations”*, terdapat tiga fungsi organisasi internasional menurut tingkat analisisnya. Fungsi yang pertama adalah di tingkat Sistem Internasional, yaitu organisasi internasional memiliki fungsi untuk memberikan sumbangsuhnya bersama berbagai negara untuk mengatasi masalah internasional yang seringkali muncul. Sumbangsih yang dimaksud disini dapat memiliki beragam bentuk. Beberapa perwujudan dari fungsi tersebut antara lain, organisasi internasional dapat berfungsi untuk melakukan survei dan mengumpulkan informasi dari seluruh dunia. Organisasi internasional juga dapat membantu menyelesaikan perselisihan yang ada di dunia, serta dapat memberikan kontribusi melalui ketetapan yang dibuatnya karena sebenarnya organisasi internasional juga memiliki otoritas di dunia internasional.

Fungsi organisasi internasional yang kedua adalah fungsi terhadap negara. Dalam hal ini, organisasi internasional berfungsi untuk menyalurkan informasi suatu negara di dunia internasional. Organisasi internasional juga dapat menghalangi atau mencegah suatu negara dalam mengambil keputusan dan dapat menjatuhkan kebijakan yang ditunjukkan untuk “menghukum” suatu negara.

Fungsi organisasi internasional yang terakhir adalah fungsi terhadap individu, yaitu menjadi wadah bagi individu untuk bersosialisasi terhadap norma-norma internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional. Selain itu organisasi internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia.

Salah satu faktor yang kemudian menjelaskan mengapa UNAMA tetap memperpanjang misi mereka di Afghanistan dapat kita lihat dari salah satu fungsi

organisasi internasional di atas. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pada tingkat sistem dimana organisasi internasional salah satunya berperan dalam penyelesaian konflik internasional. Dengan kembalinya Taliban sebagai suatu kekuatan penting di Afghanistan, situasi tersebut kemudian membuat ketegangan antara Afghanistan dan beberapa negara kembali meningkat. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan signifikansi dari misi UNAMA yang selama ini mereka emban. Apalagi di bawah kekuasaan Taliban, Afghanistan masih kekurangan sumberdaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat mereka sendiri. Oleh sebab itu, teori fungsi organisasi internasional dianggap mampu digunakan sebagai alat bantu untuk menjawab permasalahan di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam menganalisis bahasan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berisi mengenai penjelasan dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari data sekunder. Metode penelitian kualitatif dimulai dari asumsi dengan menggunakan teori yang bertujuan untuk menjelaskan isu bahasan utama. Metode kualitatif bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dalam menganalisis fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian yakni deskriptif akan membantu untuk memberikan gambaran melalui variabel yang berkaitan dengan bahasan.

Untuk menghimpun data dalam penelitian, maka akan menggunakan teknik studi pustaka, dimana teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan data sekunder, yakni mengumpulkan data melalui jurnal, buku, dokumen yang berasal dari website resmi UNAMA dan PBB, maupun sumber berita yang relevan baik di perpustakaan ataupun online.

## **PEMBAHASAN**

### **Visi-Misi dan Peran UNAMA di Afghanistan**

Setelah Uni Soviet meninggalkan tanah Afghanistan di tahun 1989, perang saudara untuk memperebutkan tampuk kekuasaan terjadi secara terus-menerus di

Afghanistan. Perang saudara tersebut berakhir setelah Taliban muncul dan mengambil alih kekuasaan pemerintah di Afghanistan. Taliban terus berkuasa hingga akhirnya dipukul mundur oleh Operasi Anakonda Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2002. Operasi Anakonda merupakan serangan militer berskala besar pertama yang dilancarkan Amerika Serikat atas nama Perang Global Melawan Teror (*Global War on Terror*) dengan target Al Qaeda dan Taliban. Selanjutnya, serangan-serangan dari Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk menumpas Taliban serta perang saudara yang terus berlangsung membuat situasi keamanan di Afghanistan menjadi makin tak terkendali.

Titik terang dalam penyelamatan serta rekonstruksi kemanusiaan dan pembangunan di Afghanistan baru terlihat ketika negara tersebut bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Awal kerjasama tersebut bisa dilihat dari Perjanjian Bonn yang ditandatangani kedua belah pihak pada 5 Desember 2001. Perjanjian tersebut membantu Afghanistan untuk melaksanakan rekonstruksi politik yang berujung pada terjadinya sebuah tindakan progresif dalam kontestasi politik Afghanistan selama konflik, yakni pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Hamid Karzai pada tanggal 22 Desember 2001. Tak lama berselang, pada 28 Maret 2002, pemerintahan Afghanistan mendorong terbentuknya UNAMA (*United Nations Assistance Missions in Afghanistan*). UNAMA sendiri merupakan misi politik khusus PBB yang bertujuan untuk membantu masyarakat Afghanistan menciptakan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan serta untuk meningkatkan keamanan manusia (*human security*) di Afghanistan. Untuk mencapai tujuan yang terakhir, yakni keamanan manusia, UNAMA memiliki empat area prioritas yakni perlindungan terhadap warga sipil, perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan, kedamaian dan rekonsiliasi, serta detensi.

Selama bertahun-tahun, UNAMA memiliki visi untuk membuat kehidupan bernegara di Afghanistan berjalan dengan stabil dan lancar, ditandai dengan kondisi masyarakatnya yang mampu hidup dengan damai baik perdamaian antar masyarakatnya serta perdamaian dengan para tetangganya. Hak asasi manusia dari masyarakat Afghanistan juga harus dijunjung tinggi dan pemerintah mampu menyediakan layanan-layanan mendasar untuk seluruh masyarakat. Visi tersebut berusaha diwujudkan UNAMA

dengan membantu Afghanistan dalam meletakkan dasar-dasar perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun hal-hal yang mereka lakukan untuk merealisasikan misi tersebut adalah:

- 1) Membangun budaya perdamaian, termasuk memberi dukungan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, mempromosikan inklusi dan kohesi sosial; memperkuat kerjasama di tingkat regional untuk mendukung perdamaian dan stabilitas; mendukung pembangunan perdamaian yang memerhatikan gender dan pemulihan; serta mengadopsi keadilan transnasional.
- 2) Memperkuat kedaulatan Afghanistan dengan mempromosikan kepemilikan nasional dan akuntabilitas institusi-institusi yang dibangun berdasarkan aturan hukum, *good governance*, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, serta memberikan layanan dasar (*basic services*) pada masyarakat di seluruh negeri.
- 3) Meraih koherensi yang lebih besar antara prioritas pemerintah Afghanistan dan upaya masyarakat sipil internasional dalam bidang perdamaian, pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, sejak terjang UNAMA di Afghanistan sejak pertama kali didirikan sudah banyak memunculkan perubahan yang signifikan. Badan ini telah melakukan banyak program kerja sebagai bentuk bantuannya kepada Afghanistan. UNAMA dibentuk untuk meletakkan dasar-dasar perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. UNAMA telah melakukan berbagai bentuk bantuan seperti permasalahan hak asasi manusia, kerjasama regional, dan masalah politik. Konflik di Afghanistan yang tak berkesudahan memberikan dampak yang besar bagi warga sipil. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan anti-pemerintah, termasuk kelompok Taliban, membuat banyak korban warga sipil yang berjatuh. Korban-korban yang berjatuh merupakan akibat dari kontak senjata ataupun terbunuh karena ledakan. Kelompok non-pemerintah biasanya menggunakan bom bunuh diri.

Untuk menangani kasus ini, UNAMA bekerjasama dengan AIHRC (Afghanistan Independent Human Rights Commission) berupaya untuk menyelidiki pihak siapa yang harus bertanggungjawab atas serangan yang telah menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dari kerusakan dan kerugian yang

telah diakibatkan oleh kebrutalan ini. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada kelompok tertentu untuk memperhatikan perlindungan warga sipil. Dari sisi Pemerintah Afghanistan sendiri telah berupaya melindungi warga sipil dalam skala lokal dengan program *Afghanistan Local Police* (ALP). ALP menjalankan tugasnya dengan melaporkan kegiatannya pada polisi lokal. Disinilah UNAMA dengan AIHRC turut serta meninjau dan mengevaluasi kinerja ALP.

Perang bersenjata masih terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa warga sipil membuat UNAMA mendesak kelompok tersebut untuk tetap mematuhi hukum humaniter internasional. Sebagai respon, di tahun 2011, kelompok anti-pemerintah, terutama Taliban, telah mengeluarkan pernyataan secara publik bahwa akan melindungi warga sipil. UNAMA menghimbau untuk tidak melibatkan warga sipil ke dalam konflik ini. Pada tahun 2012, korban meninggal warga sipil menurun, tercatat di tahun 2011 korban sipil mencapai 3021 korban (UNAMA, 2011: 1), sedangkan di tahun 2012 korban meninggal 2754 korban (UNAMA, 2012: 1).

Konflik yang telah terjadi sejak lama telah membuat kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi. Bahkan selama periode kependudukan kelompok Mujahidin tahun 1992 hingga 1996 telah merugikan segala aspek kehidupan masyarakat Afghanistan, terutama yang dialami perempuan. Hak yang dimiliki perempuan dibatasi bahkan mendapat penyiksaan, dipaksa menikah, penculikan, dan kekerasan seksual hingga diperdagangkan.

Kemunculan dan kemenangan Taliban di Afghanistan juga tidak membuat kekerasan terhadap perempuan membaik malah semakin memperparah kondisi perempuan. Taliban dengan ideologi sentrisnya terhadap hukum syari'ah semakin membuat perempuan terpinggirkan. Pada tahun 2009, Taliban menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan dewan perwakilan tingkat provinsi—Sitara Achakzai— yang menyerukan emansipasi wanita. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang mengurangi keaktifannya di parlemen Afghanistan. (UNAMA, 2009: 12)

Peristiwa lain yakni pengeboman di sekolah—khususnya sekolah perempuan—yang dilakukan tiga kali sejak bulan April hingga Mei 2009 telah membuat banyak anak perempuan sakit hingga dilarikan di rumah sakit. Di bulan April 2009 tepatnya di provinsi

Parwan terdapat ledakan yang mengakibatkan banyak anak perempuan dilarikan ke rumah sakit karena menghirup gas. Beberapa hari setelahnya di provinsi yang sama kembali terjadi ledakan yang membuat 61 anak perempuan serta satu orang guru harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian di bulan Mei 2009 di provinsi Kapisa 90 anak perempuan harus dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup aroma ledakan gas. Pada saat itu membuat ditutupnya ratusan sekolah. Hal ini diyakini masyarakat Afghanistan sebagai upaya Taliban untuk membuat perempuan tidak mendapatkan pendidikan (UNAMA, 2009: 16).

Pada bulan Agustus 2009, pemerintah Afghanistan kemudian menyepakati *Law on Elimination Violence Against Women (EVAW law)*. EVAW law ini merupakan kumpulan hukum yang berupaya untuk menghilangkan kebiasaan praktek yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan terhadap Islam. UNAMA bekerjasama dengan aktivis perempuan untuk menyerukan kesadaran masyarakat akan hukum ini. UNAMA menyarankan bahwa konstitusi Afghanistan yang sangat kental akan ajaran-ajaran Islam seharusnya dapat dipakai oleh pemerintah sebagai upaya mempromosikan interpretasi yang komprehensif terhadap hukum Syariah yang menghormati hak-hak manusia, terutama perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok Taliban saja tetapi dari individu pun juga. Nilai-nilai tradisional dan agama yang masih kental dinilai menjadi penyebabnya.

UNAMA membantu pemerintah Afghanistan untuk mengevaluasi dari EVAW law ini. Sejak diterapkannya EVAW law, pemerintah Afghanistan memperbanyak cabang Komisi Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan sebagai langkah untuk menyukseskan EVAW law. UNAMA mewawancarai lebih dari 261 pewawancara yang terdiri dari jaksa, polisi, hakim dan perwakilan kementerian urusan perempuan terkait kasus individu. Hal ini merupakan langkah UNAMA membantu penguatan penegakan EVAW law di Afghanistan (UNAMA, 2011: iii). UNAMA beserta AIHRC mencatat sebanyak 4.010 kasus kekerasan perempuan yang telah masuk dalam pelaporan dari bulan Maret hingga Oktober 2012. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang menandakan semakin sadar dan berani perempuan di Afghanistan atas ketidakadilan yang dialaminya (UNAMA, 2012: iv).

UNAMA sebagai perpanjangan tangan PBB yang diberi mandat langsung oleh Dewan Keamanan PBB untuk memantau tempat-tempat penahanan dan mendukung upaya pembentukan sistem peradilan dan transparansi dalam sektor penjara dalam implementasi hak asasi manusia dari konstitusi Afghanistan dan perjanjian internasional. UNAMA dalam menjalankan mandatnya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah sehingga diberi akses ke dalam fasilitas penahanan. Langkah untuk menjalankan mandat ini UNAMA melakukan wawancara kepada para tahanan. Tahanan yang diwawancarai adalah tahanan atas kejahatan nasional, orang yang memfasilitasi bom bunuh diri, tersangka kelompok taliban, perakit peledak rakitan, dan kejahatan lain yang berkaitan dengan perang bersenjata di Afghanistan. Fokus utama yang akan dilakukan UNAMA adalah untuk melihat bagaimana instansi pemerintah memperlakukan para tahanan.

Sepanjang tahun 2011, UNAMA telah mewawancarai 273 tahanan, hasilnya terdapat 125 tahanan yang mengalami penyiksaan. Penyiksaan yang dilakukan berupa diikat dengan besi, dicambuk, pencabutan kuku kaki, disetrum dengan kawat listrik, pemukulan di area vital, bahkan diancam akan dilecehkan. Penyiksaan ini juga termasuk tidak diberikannya akses kesehatan selama di masa penjara. Selain itu, UNAMA menemukan tahanan anak dibawah 18 tahun yang juga mengalami penyiksaan. UNAMA yang diberikan mandat untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia telah melakukan berbagai upaya. Upaya ini dilakukan untuk meninjau kewajiban pemerintah Afghanistan dalam memberikan perawatan terhadap tahanan agar sesuai dengan hukum HAM Afghanistan dan internasional.

### **Perpecahan di Afghanistan dan Peran UNAMA Pasca Taliban Kembali**

Setahun lebih setelah Taliban berkuasa, Afghanistan tetap berada dalam kondisi kritis dan memprihatinkan, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Sebuah studi mengestimasi bahwa hampir separuh dari populasi Afghanistan, dengan total penduduk hampir 18,9 juta orang—mengalami kondisi ketidaktahanan pangan yang parah. Sebagian besar dari penduduk Afghanistan merasa terabaikan dan terus meminta bantuan internasional, terlebih ketika Taliban memusnahkan mekanisme-mekanisme perlindungan seperti penghapusan Kementerian Urusan Perempuan yang selama ini

mengurusi hak-hak sosial, politik, dan hukum terkait gender. Banyak dari masyarakat Afghanistan yang memilih meninggalkan tanah kelahirannya setelah Taliban kembali berkuasa. Melansir dari BBC, ribuan warga telah menyeberang ke Pakistan setelah Taliban menduduki Kabul. Sementara itu, sekitar 1.500 warga mendirikan tenda-tenda darurat di kawasan perbatasan Uzbekistan. Tingginya tingkat eksodus ini menunjukkan rendahnya angka penerimaan masyarakat terhadap kependudukan Taliban. Bukan tanpa alasan, penolakan ini didasari oleh luka lama yang ditorehkan Taliban pada pendudukannya di tahun 1996-2001 silam. Rezim Taliban kala itu juga tidak mendapatkan pengakuan dari PBB karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan. Lebih lanjut, beberapa faktor di balik gagalnya rezim Taliban melindungi hak asasi manusia masyarakat Afghanistan serta menciptakan pemerintahan yang baik menurut (Anugerah & Purba, 2021) adalah:

- 1) Pemerintahan yang otoriter, semua keputusan diambil secara sepihak tanpa melibatkan atau mempertimbangkan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum juga tidak diperkenankan karena dianggap melanggar ajaran agama.
- 2) Ekonomi sangat terpuruk, sebab Taliban memaksa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Afghanistan untuk membayar pajak hingga 50%. Bila tidak, perusahaan-perusahaan tersebut dilarang beroperasi dan bahkan dapat diserang oleh militer setempat.
- 3) Pemberlakuan hukum syariat Islam yang revolusioner dan "keras". Taliban merombak paksa adat-istiadat masyarakat Afghanistan dan membentuk polisi keagamaan yang kerap melakukan patroli dengan membawa cambuk dan senapan untuk menghukum orang-orang yang dianggap "melanggar syariat".

Kependudukan Taliban tersebut akhirnya berakhir setelah Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada tahun 2001. Invasi tersebut merupakan buntut dari aksi teror di gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada 11 September tahun yang sama. Osama bin Laden yang kala itu menjadi *suspect* otak aksi teror diduga bersembunyi di Afghanistan. Perlindungan yang diberikan Taliban terhadap pimpinan jaringan Al-Qaeda tersebut membuatnya turut menjadi serangan target dari Amerika Serikat. Invasi beruntun yang dilancarkan Amerika Serikat akhirnya melemahkan

kekuasaan Taliban secara bertahap. Namun, invasi Amerika Serikat tersebut tak lantas membuat Taliban kehilangan eksistensinya. Setiap kali Amerika Serikat lengah, seperti pada tahun 2003 kala Amerika Serikat berkonflik dengan Irak, Taliban kembali berusaha mengembalikan kekuasaannya. Hal tersebut membuat kondisi keamanan di Afghanistan menjadi fluktuatif.

Setelah dua dekade memerangi Taliban, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, Amerika Serikat memutuskan untuk menarik kembali seluruh pasukannya. Penarikan mundur tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Afghanistan bentukan Amerika Serikat, terlebih ketika Presiden Afghanistan Ashraf Ghani justru memutuskan untuk melarikan diri ke Uni Emirat Arab kala kondisi Afghanistan sudah tak kondusif pasca Amerika Serikat pergi. Kekosongan kepemimpinan di Afghanistan otomatis dimanfaatkan Taliban untuk kembali menguasai negara tersebut pada Agustus 2021. Meski berjanji untuk merubah aturan main di rezim kali ini, misalnya dengan mengizinkan para perempuan untuk memiliki kehidupan normal di bawah naungan syariat, pada kenyataannya Taliban tetap bermain dengan cara lama. Laporan PBB menyebutkan bahwa dalam kurun waktu setahun lebih pasca kembalinya Taliban, kelompok tersebut telah secara sistematis mengecualikan para perempuan dari kehidupan publik. Perempuan harus menutupi tubuh dan wajah mereka, tidak boleh mengakses fasilitas publik dan bepergian tanpa didampingi *mahram* laki-laki, hingga puncaknya menghapus Kementerian Urusan Perempuan.

Tidak adanya perlindungan hak asasi, utamanya untuk kaum perempuan ini juga membuat atensi publik terhadap UNAMA meningkat. Hal tersebut tak bisa terelakkan mengingat peran UNAMA yang signifikan dalam proteksi keamanan di Afghanistan. Setelah didirikan tahun 2002, UNAMA menjadi salah satu "penangkal petir" bagi setiap gelombang ketidakamanan yang terjadi atas aksi persekutif dari dinamika kekuasaan Taliban. UNAMA dan misi yang dibawanya berperan sebagai tangan kanan bagi PBB, menjadi pengawas bagi isu-isu keamanan manusia. Dalam perkembangannya sekarang, fokus UNAMA bertambah menjadi fokus pada misi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak asasi manusia yang merata untuk seluruh masyarakat Afghanistan, dan pemerintahan yang inklusif.

### **Perpanjangan Misi UNAMA dan Alasan di Balikny**

Pada 2021, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan membuat Taliban memberontak dan kembali berkuasa. Setelah mengambil alih kuasa, Taliban dengan cepat langsung mengambil alih otoritas negara dan membentuk pemerintahan sementara. Banyak yang mengkhawatirkan kepemimpinan Taliban ini akan sama seperti tahun 1996-2001, namun Taliban mengungkapkan janjinya untuk mengubah *imaganya* dari kelompok pemberontak ke pemerintahan fungsional. Taliban mengupayakan penyediaan keamanan, makanan dan ekonomi Afghanistan. Walaupun kenyataannya Taliban tengah berusaha sebaik mungkin, tetapi terdapat beberapa isu yang memang sengaja diabaikan.

Taliban tetap menyampingkan posisi perempuan, terutama di dalam pendidikan dan politik. Seluruh menteri di dalam pemerintahan yang dipimpin Taliban berjenis kelamin laki-laki dan merupakan anggota dari Taliban itu sendiri. Angka pernikahan anak perempuan juga mengalami peningkatan. Di daerah perkotaan anak perempuan tidak diperbolehkan pergi ke sekolah menengah. Organisasi non pemerintah Amnesty International menyelenggarakan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan penyalahan hak asasi perempuan Afghanistan tersebut. Penelitian Amnesty yang dilakukan sejak September 2021 hingga Juni 2022 tersebut melibatkan 90 wanita dan 11 anak perempuan Afghanistan dengan rentang usia 14-74 tahun. Mereka juga tinggal secara terpisah di 20 provinsi yang berbeda (Amnesty International, 2022). Hasilnya, organisasi tersebut menemukan berbagai penyalahan hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim Taliban terhadap kaum perempuan. Pertama, Taliban telah melakukan limitasi bahkan eradikasi terhadap fasilitas dan instansi-instansi yang selama ini menjadi wadah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Sistem perlindungan berupa *shelter* dan layanan-layanan untuk perempuan ditutup. Penutupan tersebut membuat banyak penyintas kekerasan terpaksa kembali ke keluarganya atau bahkan hidup di jalanan dan tempat yang tidak layak lainnya. Di bawah kekuasaan Taliban, para perempuan juga ditekan dengan kebijakan diskriminatif seperti larangan bepergian sendiri. Masalahnya, penanganan Taliban terhadap perempuan yang dianggap

melanggar aturan-aturan moralnya tergolong represif, yakni menangkap dan menahan perempuan tersebut tanpa kompromi (Amnesty International, 2022).

Tak hanya terkait kegagalan dalam memenuhi hak-hak asasi perempuan, Taliban juga memberi limitasi terhadap pers. Pers kembali merasakan ancaman dan penekanan. Jurnalis dan presenter perempuan dilarang untuk tampil pada produksi media atau siaran televisi milik negara. Pada media milik swasta, perempuan hanya boleh tampil dalam siaran media bila wajahnya ditutup cadar. Represi media ini jauh lebih terasa pada jurnalis-jurnalis yang bekerja di provinsi atau daerah. Mereka dituntut untuk meminta izin sebelum meliput liputan tertentu. Dalam urusan jenis konten, Taliban melarang tayangnya konten-konten hiburan seperti acara musik, opera sabun, hingga iklan-iklan yang dianggap tak relevan.

Segala pembatasan dan tindakan keras yang dijalankan Taliban, baik kepada perempuan, pers, dan sektor lainnya membuat situasi di Afghanistan memburuk. Negara ini kembali menghadapi krisis ekonomi yang lebih buruk dari sebelumnya. Selama ini bantuan dari beberapa negara dan organisasi internasional yang menjadi sumber utama perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sehingga pada awal kembalinya Taliban membuat beberapa negara menjatuhkan sanksi ekonomi. Pada akhirnya membuat situasi ekonomi Afghanistan semakin krisis.

Sebagai badan resmi dari PBB, UNAMA turut merilis laporan tentang situasi keamanan hak asasi manusia di Afghanistan. Menurut laporan periode 15 Agustus 2021 - 15 Juni 2022 korban sipil akibat serangan dari "Islamic State in Iraq and the Levant-Khorasan Province" yang mengakibatkan 2106 korban dengan 700 meninggal dunia dan 1406 terluka. Pelanggaran hak asasi kebebasan pers dengan 173 jurnalis dan pekerja media ditangkap dan penahanan sewenang-wenang, dianiaya, dan ancaman intimidasi. Krisis ekonomi juga semakin parah, diperkirakan setidaknya 59% dari populasi sekarang tengah membutuhkan bantuan kemanusiaan (UNAMA, 2022).

Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia dan krisis yang timbul setelah Afghanistan kembali dikuasai oleh rezim Taliban membuat UNAMA tidak bisa diberhentikan begitu saja. UNAMA meminta kepada masyarakat internasional untuk tetap melanjutkan dukungannya kepada masyarakat Afghanistan. Apabila akan

menjatuhkan sanksi, maka diharapkan tidak berdampak negatif terhadap HAM dan kebutuhan masyarakat Afghanistan. UNAMA sebagai badan yang dibentuk dari PBB diharapkan dapat memantau, menasihati, dan melindungi warga Afghanistan dari kepemimpinan Taliban.

Oleh karena itulah, Dewan Keamanan PBB memilih untuk memperpanjang mandat UNAMA seiring dengan urgensi kepentingannya di Afghanistan yang makin meningkat setelah Taliban kembali berkuasa (Pradhan & Smith, 2022). Mandat tersebut diperbarui Dewan Keamanan PBB pada 17 Maret 2022 dengan total 14 negara setuju dan Rusia abstain. Dokumen perpanjangan mandat yang dirancang oleh Estonia dan Norwegia tersebut menekankan alasan di balik perpanjangan mandat UNAMA. Alasan yang pertama menyinggung urgensi dibangunnya pemerintahan yang inklusif dan representatif (Al Jazeera, 2022). Sementara alasan kedua adalah untuk membela kepentingan perempuan dengan mengedepankan "partisipasi perempuan secara penuh, setara, dan bermakna, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, utamanya untuk perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas". Secara implisit, kedua alasan perpanjangan mandat tersebut merupakan anti tesis dari kebijakan yang berlangsung di Afghanistan pasca kembalinya Taliban. Pemerintahan yang otoriter jelas tidak lagi mampu menjadi representasi bagi kepentingan masyarakat. Sebaliknya, pemerintahan yang otoriter tersebut membuat masyarakat sipil makin dirugikan—dalam hal ini utamanya adalah kaum perempuan.

Dalam dokumen Resolusi 2626, turut dijelaskan alasan-alasan lain di balik keputusan PBB memperpanjang mandat UNAMA. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Menekankan pentingnya peran PBB di Afghanistan dengan meneruskan aksinya dalam mempromosikan kedamaian dan stabilitas di Afghanistan.
2. Melakukan afirmasi kembali terkait komitmen kuat PBB dalam menegakkan kedaulatan, kemandirian, integritas teritorial, dan persatuan nasional Afghanistan.
3. Menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang inklusif dan representatif serta menekankan partisipasi perempuan yang penuh dan setara.

4. Bentuk ekspresi dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan kemanusiaan di Afghanistan yang makin memburuk dengan lemahnya ketahanan pangan, kelompok minoritas yang tertindas.
5. Mengembalikan sistem perbankan dan finansial dengan kembali menggunakan aset dari Bank Pusat Afghanistan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afghanistan.

Secara umum, alasan-alasan PBB dalam memperpanjang mandat UNAMA adalah untuk memastikan Afghanistan mampu berdiri sebagai negara yang berdaulat dan damai, meskipun kini berada dalam genggaman Taliban. UNAMA tidak hadir untuk membebaskan Afghanistan dari kelompok tersebut, namun UNAMA ada untuk membantu Afghanistan keluar dari kemunduran dan ketidakstabilan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selain itu, dikhawatirkan pemerintahan Taliban saat ini akan sama seperti dahulu, yakni mengisolasi Afghanistan dari dunia internasional. Untuk itu, dengan hadirnya UNAMA maka akan memastikan bahwa Taliban tidak akan melakukan hal yang sama.

## **KESIMPULAN**

Konflik di Afghanistan yang belum menemukan titik perdamaian telah membuat kerugian yang besar. Dari tahun 80an saat invasi Uni Soviet hingga kembali berkuasanya Taliban tahun 2021, Afghanistan belum merasakan ketenangan yang murni. Kelompok Taliban telah menguasai Afghanistan sebanyak 2 kali. Taliban terdahulu dikategorikan sebagai kelompok pemberontak (teroris). Amerika yang memutuskan menarik diri dari Afghanistan karena menganggap Taliban berbeda dengan Taliban sebelumnya, membuat Taliban dengan mudah mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Banyak masyarakat yang khawatir dengan pemerintahan Taliban yang akan kembali seperti dahulu.

Untuk itu, UNAMA dibentuk oleh PBB sebagai pengawas atas kondisi memprihatinkan Afghanistan. PBB telah menaruh kepercayaan pada UNAMA dalam misi kemanusiaan khusus Afghanistan. UNAMA telah membantu pemerintah Afghanistan-bentukan dari Amerika- dalam menata tatanan politik, sosial, dan mengawasi

terpenuhinya hak asasi manusia. Kekhawatiran ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Afghanistan, dunia internasional juga telah menyampaikan kekhawatirannya. Organisasi internasional dan beberapa negara bahkan telah menjatuhkan sanksi embargo kepada Taliban. Namun keputusan sanksi ini dinilai kurang tepat karena pemerintah Afghanistan menggantungkan keuangan dan sandang-pangan pada bantuan ini. Dengan kondisi ini Afghanistan dinilai belum mampu berdiri sendiri. PBB masih akan memperpanjang misi UNAMA. UNAMA hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu Afghanistan bukan sebagai badan yang melawan Taliban. UNAMA justru akan membantu Afghanistan mengawasi dan menyelesaikan permasalahan terkait kemanusiaan serta memastikan Taliban tidak mengisolasi diri dari dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2022, September 17). *UN Security Council extends Afghan mission mandate for six months*. Al Jazeera. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/17/un-security-council-extends-afghan-mission-mandate-for-six-months>
- Amnesty International. (2022, Juli 27). *Afghanistan: Death in slow motion: Women and girls under Taliban rule*. Amnesty International. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/5685/2022/en/>
- Anugerah, B., & Purba, J. (2021, Desember 30). *Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan Di Bawah Rezim Taliban Dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global*. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(3), 13-31. <https://www.researchgate.net/publication/357430930>
- Byrd, W. (2022, Agustus 8). *One Year Later, Taliban Unable to Reverse Afghanistan's Economic Decline*. United States Institute of Peace. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.usip.org/publications/2022/08/one-year-later-taliban-unable-reverse-afghanistans-economic-decline>
- Cavanagh, M., Steinwehr, U., Walter, J. D., & Hakimi, A. (2022, November 8). *Fact check: Have Taliban kept their promises?* DW. Retrieved November 11, 2022, from <https://www.dw.com/en/fact-check-have-the-taliban-kept-their-promises/a-62649985>
- Council of Foreign Relations. Agustus 17, 2022. *The Taliban in Afghanistan*. <https://www.cfr.org/background/taliban-afghanistan>
- David Zucchino. 2021. *Kabul's Sudden Fall to Taliban Ends U.S. Era in Afghanistan*. *The New York Times*. <<https://www.nytimes.com/2021/08/15/world/asia/afghanistan-taliban-kabul-surrender.html>> [accessed 21 September 2022].
- Fuadi, Ahmad. 2014. *Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012*. *Jurnal FISIP Vol 1 No 2*

Pradhan, A., & Smith, G. (2022, Januari 28). *Toward a New Mandate for the UN Mission in Afghanistan*. International Crisis Group. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/toward-new-mandate-un-mission-afghanistan>

UNAMA. 2009. *Silence is Violence : End the Abuse of Women in Afghanistan*. UNAMA reports

UNAMA. 2011. *A Long Way to Go: Implementation of the Elimination of Violence against Women Law in Afghanistan*. UNAMA reports

UNAMA. 2011. *Annual Report 2011 on Protection of Civilians in Armed Conflict*. UNAMA reports.

UNAMA. 2012. *Annual Report 2011 on Protection of Civilians in Armed Conflict*. UNAMA reports.

UNAMA. 2012. *Still a Long Way to Go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan*. UNAMA reports.

UNAMA. July 20, 2022. *UN Releases Report On Human Rights In Afghanistan Since The Taliban Takeover*. <https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover>

Valeri Modebadze *AFGHANISTAN UNDER TALIBAN: A NEW REGIME POSES A THREAT TO INTERNATIONAL STABILITY*. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8.1 (2022), 277–91.